



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau nomor 244);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau nomor 803);

MEMUTUSKAN:


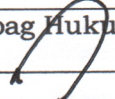
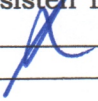

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


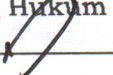
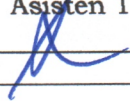

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah.
11. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah setelah dikurangi penerimaan retribusi daerah yang penggunaannya dibatasi/ditentukan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah tahun anggaran 2022 kepada Desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi;
- c. penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing Desa di tahun 2021.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan rumus:

$$DBHPRD = AD + AF$$

$$AD = \frac{JDBHPRD \times 60\%}{D}$$

$$AF = RRPD \times JAF$$

$$RRPD = (RPD/TRPD Z1) \times 100\%$$

Keterangan :

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa


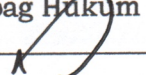
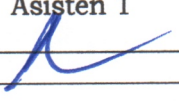

RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa

JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)

RPD = Realisasi Pajak Desa

TRPD = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau

D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

| | | | |
|---|---|--|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

BAB III
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

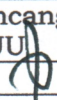
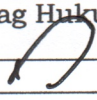
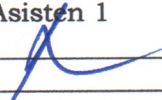
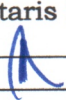
- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat penyaluran;
 - b. rencana penggunaan dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2021; dan
 - d. surat keterangan Lunas pajak daerah atas belanja dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2021.
- (4) Pajak daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu pajak atas belanja makan minum kegiatan, Pajak penggunaan Mineral Bukan Logam dan batuan atas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana dan realisasi penggunaan dana.
- (5) Dalam hal terdapat Desa tidak lunas SPPT PBB Tahun 2021, Desa wajib menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2021 kepada BKD untuk mendapatkan surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan aset Desa sampai dengan tahun 2021 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.
- (7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di rekening kas Daerah.
- (8) Sisa dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 digunakan untuk:

- a. kegiatan di bidang:
 1. penyelenggaraan pemerintahan;
 2. pembangunan;

| | | | |
|---|---|--|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

3. pemberdayaan masyarakat; dan
4. pembinaan masyarakat;
- b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi, administrasi pertanahan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta kegiatan dalam sub bidang Pertanahan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDes;
 - b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pemeriksaan bagi APIP.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.



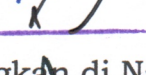
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

| BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|
| JABATAN | PARAF |
| WABUP | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABBAG |  |
| Sub.Koordinator | |
| Perancang | |

| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
|---|---|
| JABATAN | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. KADIS |  |
| 3. SEKRETARIS |  |
| 4. KABID |  |
| SUBBAG | |
| SUBID | |





Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH



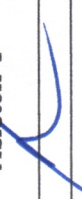

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022


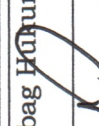


| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Realisasi Pajak | | Alokasi Formula | Bobot * Alokasi Formula | Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah per-Desa |
|-----|-----------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | Realisasi Pajak | Rasio Pajak | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)= (4)+(8) |
| 1 | Lamandau | Sungai Tuat | 17.444.567 | 337.450 | 0,000137 | 988.525.481 | 135.850 | 17.580.417 |
| 2 | Lamandau | Tanjung Beringin | 17.444.567 | 19.753.385 | 0,008045 | 988.525.481 | 7.952.288 | 25.396.855 |
| 3 | Lamandau | Cuhai | 17.444.567 | 4.939.813 | 0,002012 | 988.525.481 | 1.988.662 | 19.433.229 |
| 4 | Lamandau | Kawa | 17.444.567 | 19.081.314 | 0,007771 | 988.525.481 | 7.681.727 | 25.126.294 |
| 5 | Lamandau | Karang Taba | 17.444.567 | 2.362.680 | 0,000962 | 988.525.481 | 951.164 | 18.395.731 |
| 6 | Lamandau | Penopa | 17.444.567 | 8.365.650 | 0,003407 | 988.525.481 | 3.367.831 | 20.812.398 |
| 7 | Lamandau | Suja | 17.444.567 | 20.264.904 | 0,008253 | 988.525.481 | 8.158.214 | 25.602.781 |
| 8 | Lamandau | Sekoban | 17.444.567 | 18.948.394 | 0,007717 | 988.525.481 | 7.628.216 | 25.072.783 |
| 9 | Lamandau | Bakonsu | 17.444.567 | 57.899.450 | 0,023580 | 988.525.481 | 23.309.073 | 40.753.640 |
| 10 | Lamandau | Samu Jaya | 17.444.567 | 10.755.087 | 0,004380 | 988.525.481 | 4.329.767 | 21.774.334 |
| 11 | Delang | Riam Panahan | 17.444.567 | 10.844.080 | 0,004416 | 988.525.481 | 4.365.593 | 21.810.160 |
| 12 | Delang | Sepoyu | 17.444.567 | 6.922.205 | 0,002819 | 988.525.481 | 2.786.731 | 20.231.298 |
| 13 | Delang | Nyalang | 17.444.567 | 7.140.577 | 0,002908 | 988.525.481 | 2.874.643 | 20.319.210 |
| 14 | Delang | Riam Tinggi | 17.444.567 | 2.281.083 | 0,000929 | 988.525.481 | 918.315 | 18.362.882 |
| 15 | Delang | Landau Kantu | 17.444.567 | 2.257.465 | 0,000919 | 988.525.481 | 908.807 | 18.353.374 |
| 16 | Delang | Lopus | 17.444.567 | 220.965 | 0,000090 | 988.525.481 | 88.956 | 17.533.523 |
| 17 | Delang | Kubung | 17.444.567 | 2.104.133 | 0,000857 | 988.525.481 | 847.079 | 18.291.646 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten I | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |



| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Realisasi Pajak | | Alokasi Formula | Bobot * Alokasi Formula | Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah per-Desa |
|-----|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | Realisasi Pajak | Rasio Realisasi Pajak | | | |
| 18 | Delang | Sekombulan | 17.444.567 | 5.308.665 | 0,002162 | 988.525.481 | 2.137.154 | 19.581.721 |
| 19 | Delang | Penyombaan | 17.444.567 | 6.657.861 | 0,002711 | 988.525.481 | 2.680.312 | 20.124.879 |
| 20 | Delang | Hulu Jojabo | 17.444.567 | 7.145.066 | 0,002910 | 988.525.481 | 2.876.450 | 20.321.017 |
| 21 | Bulik | Sungai Mentawa | 17.444.567 | 19.560.290 | 0,007966 | 988.525.481 | 7.874.552 | 25.319.119 |
| 22 | Bulik | Guci | 17.444.567 | 26.623.387 | 0,010842 | 988.525.481 | 10.718.003 | 28.162.570 |
| 23 | Bulik | Batu Kotam | 17.444.567 | 43.134.032 | 0,017566 | 988.525.481 | 17.364.834 | 34.809.401 |
| 24 | Bulik | Kujan | 17.444.567 | 194.144.648 | 0,079066 | 988.525.481 | 78.158.459 | 95.603.026 |
| 25 | Bulik | Bunut | 17.444.567 | 78.877.015 | 0,032123 | 988.525.481 | 31.754.190 | 49.198.757 |
| 26 | Bulik | Beruta | 17.444.567 | 35.585.847 | 0,014492 | 988.525.481 | 14.326.097 | 31.770.664 |
| 27 | Bulik | Tamiang | 17.444.567 | 95.635.565 | 0,038948 | 988.525.481 | 38.500.821 | 55.945.388 |
| 28 | Bulik | Bumi Agung | 17.444.567 | 57.172.701 | 0,023284 | 988.525.481 | 23.016.500 | 40.461.067 |
| 29 | Bulik | Sumber Mulya | 17.444.567 | 56.226.143 | 0,022898 | 988.525.481 | 22.635.436 | 40.080.003 |
| 30 | Bulik | Bukit Indah | 17.444.567 | 47.014.145 | 0,019147 | 988.525.481 | 18.926.884 | 36.371.451 |
| 31 | Bulik | Arga Mulya | 17.444.567 | 72.521.606 | 0,029535 | 988.525.481 | 29.195.639 | 46.640.206 |
| 32 | Bulik | Perigi Raya | 17.444.567 | 27.965.926 | 0,011389 | 988.525.481 | 11.258.480 | 28.703.047 |
| 33 | Bulik | Nanga Pamalontian | 17.444.567 | 1.931.537 | 0,000787 | 988.525.481 | 777.595 | 18.222.162 |
| 34 | Bulik Timur | Nanga Palikodan | 17.444.567 | 13.484.893 | 0,005492 | 988.525.481 | 5.428.728 | 22.873.295 |
| 35 | Bulik Timur | Sungkup | 17.444.567 | 25.140.371 | 0,010238 | 988.525.481 | 10.120.973 | 27.565.540 |
| 36 | Bulik Timur | Nuangan | 17.444.567 | 29.822.812 | 0,012145 | 988.525.481 | 12.006.023 | 29.450.590 |
| 37 | Bulik Timur | Nanga Koring | 17.444.567 | 8.645.415 | 0,003521 | 988.525.481 | 3.480.458 | 20.925.025 |
| 38 | Bulik Timur | Toka | 17.444.567 | 15.594.165 | 0,006351 | 988.525.481 | 6.277.875 | 23.722.442 |
| 39 | Bulik Timur | Sepondam | 17.444.567 | 14.154.451 | 0,005764 | 988.525.481 | 5.698.278 | 23.142.845 |
| 40 | Bulik Timur | Merambang | 17.444.567 | 32.828.804 | 0,013370 | 988.525.481 | 13.216.170 | 30.660.737 |
| 41 | Bulik Timur | Pedongatan | 17.444.567 | 96.230.000 | 0,039190 | 988.525.481 | 38.740.128 | 56.184.695 |
| 42 | Bulik Timur | Batu Tungal | 17.444.567 | 21.109.795 | 0,008597 | 988.525.481 | 8.498.349 | 25.942.916 |
| 43 | Bulik Timur | Nanga Kemujan | 17.444.567 | 1.480.125 | 0,000603 | 988.525.481 | 595.866 | 18.040.433 |
| 44 | Bulik Timur | Bukit Jaya | 17.444.567 | 11.711.651 | 0,004770 | 988.525.481 | 4.714.859 | 22.159.426 |
| 45 | Bulik Timur | Suka Maju | 17.444.567 | 28.891.564 | 0,011766 | 988.525.481 | 11.631.122 | 29.075.689 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Realisasi Pajak | | Alokasi Formula | Bobot * Alokasi Formula | Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah per-Desa |
|-----|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | Realisasi Pajak | Rasio Realisasi Pajak | | | |
| 46 | Menthobi Raya | Melata | 17.444.567 | 57.380.042 | 0,023368 | 988.525.481 | 23.099.971 | 40.544.538 |
| 47 | Menthobi Raya | Nanuah | 17.444.567 | 18.264.255 | 0,007438 | 988.525.481 | 7.352.796 | 24.797.363 |
| 48 | Menthobi Raya | Batu Ampar | 17.444.567 | 36.173.837 | 0,014732 | 988.525.481 | 14.562.809 | 32.007.376 |
| 49 | Menthobi Raya | Lubuk Hiju | 17.444.567 | 29.481.624 | 0,012006 | 988.525.481 | 11.868.668 | 29.313.235 |
| 50 | Menthobi Raya | Topalan | 17.444.567 | 9.744.880 | 0,003969 | 988.525.481 | 3.923.079 | 21.367.646 |
| 51 | Menthobi Raya | Bukit Makmur | 17.444.567 | 113.347.090 | 0,046161 | 988.525.481 | 45.631.100 | 63.075.667 |
| 52 | Menthobi Raya | Modang Mas | 17.444.567 | 50.321.898 | 0,020494 | 988.525.481 | 20.258.514 | 37.703.081 |
| 53 | Menthobi Raya | Bukit Raya | 17.444.567 | 59.988.629 | 0,024430 | 988.525.481 | 24.150.132 | 41.594.699 |
| 54 | Menthobi Raya | Mukti Manunggal | 17.444.567 | 75.212.929 | 0,030631 | 988.525.481 | 30.279.107 | 47.723.674 |
| 55 | Menthobi Raya | Sumber Jaya | 17.444.567 | 895.203 | 0,000365 | 988.525.481 | 360.389 | 17.804.956 |
| 56 | Menthobi Raya | Bukit Harum | 17.444.567 | 81.721.655 | 0,033281 | 988.525.481 | 32.899.381 | 50.343.948 |
| 57 | Sematu Jaya | Bina Bhakti | 17.444.567 | 48.226.613 | 0,019640 | 988.525.481 | 19.414.997 | 36.859.564 |
| 58 | Sematu Jaya | Wonorejo | 17.444.567 | 54.891.415 | 0,022355 | 988.525.481 | 22.098.103 | 39.542.670 |
| 59 | Sematu Jaya | Mekar Mulya | 17.444.567 | 64.489.361 | 0,026263 | 988.525.481 | 25.962.030 | 43.406.597 |
| 60 | Sematu Jaya | Jangkar Prima | 17.444.567 | 54.812.626 | 0,022323 | 988.525.481 | 22.066.384 | 39.510.951 |
| 61 | Sematu Jaya | Purwareja | 17.444.567 | 103.210.749 | 0,042033 | 988.525.481 | 41.550.428 | 58.994.995 |
| 62 | Sematu Jaya | Tri Tunggal | 17.444.567 | 80.098.934 | 0,032620 | 988.525.481 | 32.246.108 | 49.690.675 |
| 63 | Sematu Jaya | Batu Hambawang | 17.444.567 | 15.623.822 | 0,006363 | 988.525.481 | 6.289.815 | 23.734.382 |
| 64 | Sematu Jaya | Rimba Jaya | 17.444.567 | 9.108.926 | 0,003710 | 988.525.481 | 3.667.058 | 21.111.625 |
| 65 | Belantikan Raya | Nanga Belantikan | 17.444.567 | 16.160.584 | 0,006581 | 988.525.481 | 6.505.904 | 23.950.471 |
| 66 | Belantikan Raya | Sungai Buluh | 17.444.567 | 41.477.188 | 0,016892 | 988.525.481 | 16.697.824 | 34.142.391 |
| 67 | Belantikan Raya | Tangga Batu | 17.444.567 | 19.469.709 | 0,007929 | 988.525.481 | 7.838.086 | 25.282.653 |
| 68 | Belantikan Raya | Belibi | 17.444.567 | 16.742.664 | 0,006818 | 988.525.481 | 6.740.236 | 24.184.803 |
| 69 | Belantikan Raya | Bayat | 17.444.567 | 32.231.283 | 0,013126 | 988.525.481 | 12.975.621 | 30.420.188 |
| 70 | Belantikan Raya | Karang Besi | 17.444.567 | 9.216.560 | 0,003753 | 988.525.481 | 3.710.389 | 21.154.956 |
| 71 | Belantikan Raya | Benuatan | 17.444.567 | 1.217.449 | 0,000496 | 988.525.481 | 490.119 | 17.934.686 |
| 72 | Belantikan Raya | Kahingai | 17.444.567 | - | - | 988.525.481 | - | 17.444.567 |
| 73 | Belantikan Raya | Nanga Matu | 17.444.567 | 1.826.845 | 0,000744 | 988.525.481 | 735.449 | 18.180.016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Realisasi Pajak | | Alokasi Formula | Bobot * Alokasi Formula | Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah per-Desa |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | Realisasi Pajak | Rasio Realisasi Pajak | | | |
| 74 | Belantikan Raya | Bintang Mangalih | 17.444.567 | - | - | 988.525.481 | - | 17.444.567 |
| 75 | Belantikan Raya | Petarikan | 17.444.567 | 1.486.695 | 0,000605 | 988.525.481 | 598.511 | 18.043.078 |
| 76 | Belantikan Raya | Sumber Cahaya | 17.444.567 | 44.509.333 | 0,018126 | 988.525.481 | 17.918.500 | 35.363.067 |
| 77 | Batang Kawa | Batu Tambun | 17.444.567 | 3.329.317 | 0,001356 | 988.525.481 | 1.340.311 | 18.784.878 |
| 78 | Batang Kawa | Kinipan | 17.444.567 | 6.478.223 | 0,002638 | 988.525.481 | 2.607.993 | 20.052.560 |
| 79 | Batang Kawa | Ginih | 17.444.567 | 1.550.314 | 0,000631 | 988.525.481 | 624.123 | 18.068.690 |
| 80 | Batang Kawa | Benakitan | 17.444.567 | 7.969.134 | 0,003245 | 988.525.481 | 3.208.202 | 20.652.769 |
| 81 | Batang Kawa | Liku | 17.444.567 | 1.377.880 | 0,000561 | 988.525.481 | 554.705 | 17.999.272 |
| 82 | Batang Kawa | Mengkalang | 17.444.567 | 4.853.817 | 0,001977 | 988.525.481 | 1.954.042 | 19.398.609 |
| 83 | Batang Kawa | Karang Mas | 17.444.567 | 1.695.520 | 0,000691 | 988.525.481 | 682.580 | 18.127.147 |
| 84 | Batang Kawa | Kina | 17.444.567 | 6.018.603 | 0,002451 | 988.525.481 | 2.422.960 | 19.867.527 |
| 85 | Batang Kawa | Jamuat | 17.444.567 | 5.802.367 | 0,002363 | 988.525.481 | 2.335.933 | 19.780.500 |
| Total | | | 1.482.788.195 | 2.455.485.088 | 1,000000 | | 988.525.508 | 2.471.313.703 |

| | |
|--|---|
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| JABATAN | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. KADIS | |
| 3. SEKRETARIS |  |
| 4. KABID |  |
| 5. KASUBAG KASUBID | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
| JABATAN | PARAF |
| WABUP | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN | |
| KABBAG | |
| Sub.Koordinator | |
| Perancang Per UU |  |

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA